

BAB 4

IMPLIKASI KRISIS FINANSIAL ASIA 1997-1998 DAN KRISIS GLOBAL 2008 TERHADAP INDONESIA

Dalam Bab 4 ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai implikasi krisis baik krisis finansial 1997-1998 maupun krisis global 2008 terhadap Indonesia. Implikasi ini kemudian akan dianalisis secara komparatif guna mengetahui relevansi faktor politik dalam proses krisis finansial di Indonesia.

Indikator-indikator yang digunakan dalam menggambarkan kondisi Indonesia saat terjadinya krisis finansial tidak hanya indikator ekonomi namun juga indikator-indikator non-ekonomi yang dalam penulisan tesis ini dikhususkan pada indikator-indikator politik. Indikator-indikator politik dianggap turut memiliki andil dalam besar kecilnya dampak krisis terhadap suatu negara.

4.1. Implikasi Krisis Finansial Asia 1997-1998

Akibat krisis yang pada awalnya melanda Thailand, para investor asing kehilangan kepercayaan pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia sehingga para investor melakukan tindakan pengambilan dana investasi secara besar-besaran. Hal ini otomatis akan mengganggu kondisi perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Pada saat krisis terjadi, Indonesia berada dalam kondisi membangun. Kesalahan penggunaan dana investasi di Indonesia adalah ketika Indonesia menggunakan pinjaman jangka pendek untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang. Hal ini berarti bahwa pelunasan hutang dalam jangka pendek namun keuntungan yang bisa didapatkan dari proyek-proyek yang dibangun bersifat jangka panjang. Kondisi ini turut memperburuk dampak krisis finansial Asia secara ekonomi di Indonesia. Selain itu, pinjaman-pinjaman jangka pendek ini dalam mata uang Dollar AS sedangkan pengembalian kredit dilakukan dalam jangka panjang yang didapatkan adalah dalam mata uang Rupiah. Ini

menjadi indikasi bahwa neraca pembayaran RI pada akhir 1997, 1998, dan 1999 bersifat negatif (tidak ada pertumbuhan). Akibatnya pada saat nilai Rupiah jatuh terhadap kurs Dollar AS, maka pengembalian kredit dalam bentuk Rupiah dirasakan amat besar.

Tabel 4.1

Neraca Pembayaran RI 1997-1998

Periode	Transaksi Berjalan	Neraca Keseluruhan
Juni 1997	-1.102	2.242
September 1997	-1.394	-1.296
Desember 1997	-402	-9.177
Maret 1998	1.000	-4909
Juni 1998	671	1.084
September 1998	1.682	39
Desember 1998	745	369

Sumber: Data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia¹

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kepercayaan para investor asing menurun terhadap Indonesia. Pertama, sikap IMF. IMF agak sombong dan kurang fleksibel. Boleh dikatakan, IMF adalah *part of the problem* sekaligus *part of the solution*. Mereka sebagai bagian dari *problem*, tetapi mereka tetap diperlukan. Yang kedua, persepsi masyarakat dalam negeri maupun internasional bahwa pemerintah tidak bersedia melakukan reformasi secara efektif. Ada

¹ Bank Indonesia. http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/Default_SEKI_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={F24C392F-6565-43E0-915F-AAFB10F31BFC}&NRORIGINALURL=/web/id/Statistik/Statistik%2bEkonomi%2bdan%2bKeuangan%2bIndonesia/Data%2bQuery/%3fsec%3d8&NRCACHEHINT=Gues. Dipetik November 15, 2010, dari www.bi.go.id.

beberapa contoh mengenai kasus tata niaga cengkeh, mobil nasional, dan sebagainya. Ketiga, ada semacam *issue circle*, yaitu karena keadaan agak jelek, dan banyak aksi protes dari kampus dan juga buruh, para pemodal asing menjadi lebih takut lagi. Maka ada beberapa faktor yang membuat merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia. Faktor-faktor lain adalah seperti kemerosotan nilai rupiah pada Desember lalu ketika Soeharto agak sakit. Dan nilai rupiah merosot lagi pada pertengahan Januari saat ada isu BJ Habibie akan menjadi wakil presiden.²

Selain permasalahan-permasalahan teknis di atas yang kemudian memicu parahnya krisis finansial yang melanda Indonesia, praktek-praktek KKN yang marak di era Soeharto nyatanya juga sangat berpengaruh pada dampak krisis finansial Asia di Indonesia. Dana-dana investasi asing yang masuk ditengarai dipergunakan Soeharto untuk memperbesar kerajaan bisnis keluarga mereka atau biasa dikenal dengan “Keluarga Cendana”.

Indonesia pada masa terjadinya krisis sangatlah terpuruk. Krisis finansial ini kemudian tidak hanya membawa dampak pada kehidupan perekonomian bangsa Indonesia namun juga merambat pada krisis sosial dan politik di Indonesia. Pada saat krisis menggoyang Indonesia (pertengahan 1997), kondisi politik diwarnai berbagai konflik politik yang cukup represif. Kasus peristiwa 27 Juli 1997 merupakan pertanda konflik politik yang amat sensitif. Pada hari itu markas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dibakar oleh massa yang dikoordinir oleh aparat keamanan. Hal ini berawal dari terpilihnya Soerjadi menjadi ketua PDI pada saat itu. Penunjukkan Soerjadi dianggap merupakan salah satu manuver politik Soeharto, dimana dia menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi pemilihan ketua PDI. Massa pro-Megawati kemudian tidak dapat menerima penunjukkan Soerjadi menjadi ketua PDI sehingga melakukan demonstrasi besar-besaran, dan berakhir dengan pembakaran kantor PDI serta munculnya korban jiwa.

² <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/09/ekbis3.htm>. (1998, Mei 2). Dipetik November 24, 2010, dari www.tempo.co.id.

Pasca kejadian pembakaran tersebut, Indonesia semakin rapuh dalam kondisi perpolitikannya. Masyarakat kemudian merasa jenuh akan kepemimpinan Soeharto dan menginginkan Soeharto untuk segera mengundurkan diri dari kursi Presiden. Aspirasi masyarakat ini kemudian ditindaklanjuti para mahasiswa se-Indonesia dengan melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Mahasiswa kala itu menduduki gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Protes mahasiswa berubah menjadi beringas dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Mahasiswa UI sebagai pelopor gerakan ini tidak hanya melakukan protes di kampus. Mereka mengabaikan kebijakan dari Konselor UI dan pejabat militer bahwa protes dibatasi untuk dilakukan di dalam kampus. Alasan utama untuk mengabaikan ‘peraturan kampus’ adalah karena mahasiswa UI sudah kehilangan kesabaran, melihat lambatnya pemerintahan Soeharto dalam menangani krisis. Mahasiswa melakukan demonstrasi atas 6 hal, yaitu: (i) Praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam segala bentuk pada kegiatan Pemerintah harus dihapuskan, (ii) Fungsi ganda Tentara Nasional Indonesia, dalam peran politik dan kemananan, harus dihapuskan, (iii) hukum dan peraturan harus diciptakan, (iv) Undang-Undang Dasar 1945 harus direvisi, (v) demokrasi politik harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta (vi) pelaksanaan otonomi daerah harus dipercepat.³

Pada pertengahan 1998, gerakan mahasiswa terpecah menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama bertindak rasional, dan mereka percaya bahwa reformasi ekonomi politik dapat dilakukan dengan pelaksanaan enam poin permintaan mahasiswa secara bertahap. Kelompok kedua memilih untuk bertindak radikal, menginginkan Rejim Orde Baru Soeharto dan Golkar untuk dibubarkan segera. Mahasiswa merasa sangat percaya diri karena adanya dukungan dari masyarakat luas. Dukungan penuh datang setelah masyarakat Indonesia sadar bahwa hanya mahasiswa (yang tidak memiliki kepentingan terselubung) yang dapat menyuarakan keberatan mereka atas pemerintahan Soeharto.⁴

³ Zainuddin Djafar. (2006). *Rethinking the Indonesian Crisis*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, p. 268-269

⁴Ibid

Para mahasiswa bergerak sangat kuat berdasarkan moral dan perasaan, bersimpati terhadap penderitaan ekonomi masyarakat akibat krisis finansial. Dalam prakteknya, mahasiswa Indonesia pernah mengalami kesulitan akibat kebijakan negara. Pertama, tidak transparannya Pemerintah dalam kebijakan ekonomi terhadap dana luar negeri, dan tidak ada seorangpun yang tahu secara pasti penggunaan dana tersebut. Kedua, praktek KKN dalam era Orde Baru terus-menerus merusak moral rakyat Indonesia. Pada akhirnya, mahasiswa UI merasa bahwa pernyataan Soeharto mengenai pembangunan ekonomi tidak lebih dari sebiah slogan politik, dengan banyak kekurangan. Sehingga tidak ada jalan lain bagi para mahasiswa selain terus menolak pemerintahan sewenang-wenang dari rejim Soeharto.⁵

Protes dan demonstrasi mahasiswa menjadi efek bola salju yang bergulir dari satu kampus ke kampus lainnya di seluruh nusantara. Mayoritas staf universitas turut dalam aksi protes mahasiswa ini. Protes mahasiswa memasuki fase baru, yaitu mengajukan permintaan dialog politik secara serius dengan MPR. Pergerakan ini mengisyaratkan liberalisasi ekonomi disertai dengan demokratisasi politik dimana masyarakat dapat secara bebas mengekspresikan pandangan politik mereka tanpa adanya tekanan dari Pemerintah. Pergerakan mahasiswa secara dramatis terjadi pada bulan Mei 1998, di Jakarta Pusat tepat di depan gedung DPR dan MPR, dihadiri oleh sepuluh ribu mahasiswa, dosen serta staf Universitas Trisakti. Empat mahasiswa meninggal dalam peristiwa ini (Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan lesmana) setelah diterjang oleh peluru. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama 'Tragedi Trisakti'.⁶

Pada tanggal 15 dan 16 Mei 1998, situasi Jakarta masih sangat mencekam, Kemarahan mahasiswa atas kejadian tanggal 12 Mei tidak dapat dikontrol, dan sekitar sepuluh ribu mahasiswa kembali berdemonstrasi di gedung MPR pada tanggal 18 Mei 1998. Situasi politik menjadi sangat kritis. Mahasiswa terus berdatangan dan diperkirakan mencapai ratusan ribu mahasiswa berkumpul dan menduduki MPR sampai dengan tanggal 21 Mei 1998. Para mahasiswa tidak akan

⁵Ibid

⁶Ibid

meninggalkan gedung MPR sebelum tuntutan utama mereka yaitu pengunduran diri Soeharto dilaksanakan.⁷ Demonstrasi besar-besaran ini kemudian membuahkan hasil yaitu ketika Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya dan disambut dengan luapan kemenangan bagi pihak-pihak yang pro reformasi. Pengunduran diri Soeharto diikuti dengan pengangkatan Prof. BJ Habibie sebagai penggantinya (sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945). Munculnya Prof. BJ Habibie dapat dikatakan cukup kontroversial karena hal itu dilakukan terutama oleh keinginan Soeharto, tanpa melalui sidang umum MPR. Bersamaan dengan kepemimpinan Presiden BJ Habibie, Indonesia masuk pada era transisi, reformasi mulai bergulir di Indonesia sejak akhir Mei 1998.

4.2. Implikasi Krisis Global 2008 terhadap Indonesia

Kepanikan di bursa saham melanda Wall Street hingga Jakarta. Hampir semua bursa saham seluruh dunia tertekan, termasuk indeks harga saham gabungan (IHSG).⁸

Pasar modal kita terpengaruh cukup serius dengan gejolak di bursa Wall Street. Pada pertengahan 2009 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali berada pada level rendah (setelah pada akhir tahun 2008 berada pada di level tinggi). Penyebab keterpurukan pasar modal adalah: Pertama, basis kekuatan kita ada di tangan para emiten berbasis komoditas dan pertambangan. Seiring dengan meredanya gejolak harga minyak, harga komoditas, dan pertambangan juga semakin surt. Kedua, para investor asing menarik investasinya di bursa kita lantaran sebagian besar memilih memegang kas ketimbang instrumen lain.⁹

Faktor ketiga, fluktuasi nilai tukar dollar AS membuat para spekulasi mengalihkan investasinya dari pasar modal ke pasar uag. Mereka mencari keuntungan daris elisih kurs yang juga sedang bergejolak. Merosotnya

⁷ Ibid, p. 268-282

⁸ A. Prasentyantoko. (2009). *Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, p. 227

⁹ A. Prasentyantoko. (2010). *Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, p. 102

perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Harapannya dengan kebijakan suku bunga tinggi ini, pelemahan rupiah bisa dikendalikan dan pelarian modal dari bursa saham kita bisa dibendung. Namun kebijakan ini akan berdampak pada: Pertama, sektor riil akan kesulitan mengakses kredit. Kedua, beban pemerintah untuk membayar bunga obligasi semakin meningkat.¹⁰

Terhadap krisis finansial global yang dimulai dengan krisis *subprime mortgage* di AS, sektor riil kita juga terkena dampaknya. Indikasinya, beberapa sektor industri terpaksa harus mem-PHK karyawannya karena menurunnya permintaan, terutama dari AS atau negara maju lainnya yang sedang berjuang melawan krisis. Pada dasarnya, industri yang berorientasi ekspor dan berbahan baku impor terpukul secara drastis. Permintaan dari negara maju, terutama AS, menurun drastis, sementara harga bahan baku melonjak tajam akibat depresiasi rupiah. Baik dari sisi permintaan produk maupun dari pendanaan (likuiditas) mengalami tekanan yang sama beratnya.¹¹

Indonesia merupakan negara *small open economy* sehingga imbas dari krisis finansial global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Salah satu dampak dari krisis finansial global adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh mencapai 6,1% pada tahun 2008 atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,3%.¹²

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid, p. 128.

¹² *Perekonomian Indonesia Tahun 2008 Tengah Krisis Keuangan Global*. (2009, Mei 26). Dipetik Desember 12, 2010, dari <http://www.setneg.go.id/>: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3698&Itemid=29

4.2.1 Dampak Negatif Krisis Global 2008 terhadap Indonesia

Dampak negatif dari krisis global 2008 terhadap Indonesia, antara lain sebagai berikut:¹³

1. Menurunnya kinerja neraca pembayaran.

Pada saat terjadi krisis global, negara adidaya Amerika Serikat mengalami resesi yang serius, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menggerus daya beli masyarakat Amerika. Hal ini sangat mempengaruhi negara-negara lain karena Amerika Serikat merupakan pangsa pasar yang besar bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat di Amerika menyebabkan penurunan permintaan impor dari Indonesia. Dengan demikian ekspor Indonesia pun menurun. Inilah yang menyebabkan terjadinya defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Bank Indonesia memperkirakan secara keseluruhan NPI mencatatkan defisit sebesar US\$ 2,2 miliar pada tahun 2008.

Penyebab lain terjadinya defisit NPI adalah derasnya aliran keluar modal asing dari Indonesia khususnya pada pasar SUN (Surat Utang Negara) dan SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Derasnya aliran modal keluar tersebut menyebabkan investasi portofolio mencatat defisit sejak kuartal III-2008 dan terus meningkat pada kuartal IV-2008. Selain itu, adanya sentimen negatif terhadap pasar keuangan global juga membuat terjadinya pelepasan aset finansial oleh investor asing dan membuat neraca finansial dan modal ikut menjadi defisit.

2. Tekanan pada nilai tukar Rupiah

Secara umum, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil sampai pertengahan September 2008. Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja transaksi berjalan yang masih mencatat surplus serta kebijakan makroekonomi yang berhati-hati. Namun sejak pertengahan September 2008, krisis global yang semakin dalam telah memberi efek depresiasi terhadap mata uang. Kurs Rupiah melemah menjadi Rp 11.711,- per USD pada bulan November 2008 yang merupakan depresiasi yang

¹³ Ibid

cukup tajam, karena pada bulan sebelumnya Rupiah berada di posisi Rp 10.048,- per USD.

Semasa Pemerintahan Orde Baru, Indonesia menganut sistem *fixed exchange rate* atau sistem nilai tukar tetap. Tetapi pada Pemerintahan berikutnya sampai sekarang, sistem yang dianut telah berubah menjadi sistem *floating exchange rate* atau sistem nilai tukar mengambang. Dengan sistem ini nilai tukar rupiah menjadi bergantung pada *supply* dan *demand* di pasar. Hal ini berbeda dengan sistem *fixed exchange rate* dimana Bank Indonesia berkewajiban menjaga Rupiah konstan dengan aktif membeli dan menjual valas untuk menghadapi *supply* dan *demand* yang berubah-ubah.

3. Dorongan pada laju inflasi.

Dorongan tersebut berasal dari lonjakan harga minyak dunia yang mendorong dikeluarkannya kebijakan subsidi harga BBM. Tekanan inflasi makin tinggi akibat harga komoditi global yang tinggi. Namun inflasi tersebut berangsur menurun di akhir tahun 2008 karena harga komoditi yang menurun dan penurunan harga subsidi BBM.

4.2.2 Kebijakan Bank Indonesia dalam Menghadapi Krisis Global

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang mempunyai independensi dari pemerintah mempunyai kewajiban menjaga stabilitas moneter serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak dari krisis global. Bank Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan, yakni:¹⁴

1. Kebijakan dalam sektor moneter. BI mengarahkan kebijakan pada penurunan tekanan inflasi yang didorong oleh tingginya permintaan agregat dan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM yang sempat mendorong inflasi mencapai 12,14 persen pada bulan September 2008. Untuk mengantisipasi berlanjutnya tekanan inflasi, BI menaikkan BI rate

¹⁴ Ibid

dari 8 persen secara bertahap menjadi 9,5 persen pada Oktober 2008. Dengan kebijakan moneter tersebut ekspektasi inflasi masyarakat tidak terakselerasi lebih lanjut dan tekanan neraca pembayaran dapat dikurangi.

2. Kebijakan dalam sektor perbankan. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya memperkuat ketahanan sistem perbankan, khususnya dalam upaya persiapan implementasi Basel II. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar *the 1988 accord* yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.

Kebijakan dalam sektor perbankan lainnya adalah meningkatkan kapasitas pelayanan industri perbankan syariah. Sistem perbankan syariah terbukti lebih tahan terhadap hantaman krisis. Sistem perbankan ini juga sudah mulai digiatkan oleh negara-negara non-muslim seperti Inggris, Italia, Hong Kong, China, Malaysia, dan Singapura.

3. Kebijakan di sektor pembayaran. Bank Indonesia turut berupaya mencegah terjadinya guliran krisis global terhadap kelancaran sistem pembayaran nasional. Dalam mencegah risiko sistemik dari risiko gagal bayar peserta yang cenderung meningkat pada kondisi krisis dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI telah melakukan perubahan jadwal *settlement* sistem pembayaran pada hari tertentu.

Kebijakan BI dalam sistem pembayaran terus dilakukan untuk meningkatkan pengedaran uang yang cepat, efisien, aman, dan handal, meningkatkan layanan kas prima, dan meningkatkan kualitas uang. Sementara kebijakan non tunai diarahkan untuk memitigasi risiko sistem pembayaran melalui pengawasan sistem pembayaran, mengatur kegiatan

money remittances, meningkatkan efisiensi pengelolaan rekening pemerintah, dan meningkatkan pembayaran non tunai.

4.2.3 Sepuluh Jurus Penyelamatan Krisis

Berikut adalah jurus penyelamat krisis yang dipersiapkan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi gejala krisis global.¹⁵

Tabel 4.2
10 Langkah Penyelamatan Krisis

10 Jurus Penyelamatan Krisis	
Pada 28 Oktober 2008, pemerintah mengeluarkan 10 Langkah Mengantisipasi Krisis.	
1	Mewajibkan semua BUMN menempatkan seluruh hasil valuta asingnya di bank dalam negeri, dalam satu kliring house. BUMN diwajibkan melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke kantor Kementerian BUMN dan transaksinya melalui perbankan, secara mingguan dan di-update setiap hari.
2	Mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen pembiayaan, baik bilateral maupun multilateral.
3	Menginstruksikan BUMN untuk tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank. Ini untuk menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya perang harga.
4	Pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan pembelian SUN (surat utang negara) di pasar sekunder dan dilakukan secara bertahap. Ini menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap SUN dengan melakukan stabilisasi pasar SUN.

¹⁵ A. Prasentyantoko. (2010). *Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, p. 130-131

10 Jurus Penyelamatan Krisis	
5	Memanfaatkan bilateral swaps arrangement dari Bank of Japan, Bank of Korea, dan Bank of China apabila diperlukan untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran, Ini bagian dari kesepakatan ASEAN+3.
6	Menyediakan fasilitas rediskonto wesel ekspor with recourse. Tujuannya untuk menjaga agar ekspor tetap dapat berjalan dengan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran. Pemerintah akan memonitor secara ketat agar fasilitas itu tidak disalahgunakan eksportir, misalnya dengan jalan ekspor fiktif.
7.	Mengurangi pungutan ekspor minyak sawit mentah menjadi 0 persen dari sebelumnya 2,5 persen.
8.	Menyusun APBN 2009 yang memungkinkan pemerintah mengubah APBN tanpa mengurangi hak-hak DPR terkait krisis keuangan global yang diperkirakan masih terjadi sampai tahun depan.
9.	Mencegah importasi ilegal dengan menerbitkan ketentuan pembatasan impor komoditas garmen, elektronika, makanan-minuman, mainan anak-anak, dan sepatu.
10.	Membentuk gugus tugas terpadu antarinstansi terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar lewat peraturan menteri perdagangan.

Sumber: (Prasentyantoko, 2010)

4.2.4 Kasus Century sebagai salah satu bentuk Kebijakan Pemerintah atas Krisis Global 2008

Pasca *booming* krisis global 2008 yaitu pada awal tahun 2009, Indonesia secara ekonomi masih relatif stabil begitupun dengan sektor politik dan sosial. Namun, sektor politik mendapat tekanan setelah kasus Century terkuak. Dalam

Universitas Indonesia

salah satu program kebijakan pencegahan meluasnya krisis global 2008 di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait bank Century. Sektor perbankan menjadi fokus penanganan karena sasaran krisis global 2008 adalah sektor perbankan. Dalam menghasilkan kebijakan untuk stabilitas sektor perbankan ini, Pemerintah membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 3.2.

Bank Century merupakan merger tiga Bank yaitu Bank Century Invest Corporation (CIC), Bank Danpac, dan Bank Pikko pada tahun 2004. Pada 13 November 2004, Gubernur Bank Indonesia yang menjabat yaitu Boediono membenarkan bahwa Bank Century mengalami kalah kliring atau tidak dapat membayar dana permintaan nasabah sehingga terjadi *rush*. Pada 20 November 2008, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang Penetapan Status Bank Gagal pada Bank Century dan menyatakan perlunya penanganan lebih lanjut. Dalam mengambil peran sebagai ketua KSSK, Sri Mulyani menggelar rapat membahas Bank Century. KSSK menyatakan bahwa apabila Bank Century ditutup maka akan menimbulkan dampak sistemik bagi perbankan nasional.¹⁶

4.3. Analisis Komparasi Dampak krisis Finansial Asia 1997-1998 dan Krisis Global 2008 dalam Perspektif Politik

Apabila dipandang dari segi politik, maka dapat dipahami bahwa kondisi perpolitikan Indonesia menunjukkan kondisi yang lebih kondusif dalam hal profil Presiden SBY yang dipilih langsung oleh rakyat (legitimasi Pemerintahan SBY tinggi). Sistem demokrasi yang dianut Indonesia terealisasi pada masa reformasi politik pada tahun 1998. Reformasi ini membawa Indonesia pada sistem demokrasi yang lebih konkret dimana slogan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” mulai dipertimbangkan esensinya dalam kehidupan perpolitikan

¹⁶ *Kronologi Aliran Rp 6,7 Triliun ke Bank Century*. (2009, November 14). Dipetik Desember 12, 2010, dari <http://www.tempointeraktif.com/>: <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/11/14/brk,20091114-208353,id.html>

Indonesia. Hal ini tercermin dari partisipasi masyarakat secara langsung dalam pemilihan umum.

Meskipun terdapat penurunan jumlah pemilih pada Pemilu tahun 2004 namun pelaksanaan Pemilu 2004 dianggap sebagai momen bersejarah bagi Bangsa Indonesia karena pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan langsung Presiden. Pemilu Presiden 2004 ini berlangsung dalam dua kali putaran. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian terpilih sebagai Presiden pada Pemilu ini. Dengan hasil ini, maka menunjukkan bahwa Pemilu tahun 2004 merupakan Pemilu yang dijalankan secara adil dan transparan karena Pemilu Presiden 2004 dilaksanakan pada masa pemerintahan Megawati dengan pemenang Presiden SBY.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I bahwa untuk dapat memahami perbedaan dampak krisis finansial Asia 1997-1998 dan krisis Global 2008 maka terdapat beberapa indikator politik yang dianggap mampu menjelaskan perbedaan ini. Penulis berusaha untuk memunculkan perbedaan dampak yang ada dilihat dari sisi politik. Adapun indikator-indikator politik yang digunakan adalah: *voice and accountability*, *political stability*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption*.¹⁷ Dalam bab ini penulis akan membahas secara mendalam keenam indikator ini dan penerapannya dalam kehidupan perpolitikan Indonesia di masa krisis.

Krisis finansial bagi beberapa ahli dianggap sebagai salah satu produk dari kapitalisme. Berbagai macam pandangan berbedapun muncul dalam memandang krisis finansial. Tidak ada satu model baku yang dapat menjelaskan secara sempurna mengenai sebuah krisis, karena krisis yang satu dan krisis lainnya dianggap memiliki karakteristik masing-masing.

Krisis finansial terjadi akibat dari berbagai macam penyebab seperti jatuhnya nilai tukar mata uang, hilangnya kepercayaan investor yang

¹⁷ Indikator yang digunakan adalah indikator dari World Bank. "Governance Matters 2009: Worldwide Governance Indicators, 1996-2008." www.worldbank.org. Juni 2009. http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf_country.asp (diakses Maret 2010).

mengakibatkan ditariknya dana investasi mereka secara massal dari suatu negara, serta alasan-alasan lainnya.

4.3.1 *Voice and accountability*

Indikator ini menjelaskan mengenai tingkatan dimana warga negara suatu negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintahan mereka, serta kebebasan berekspresi, berkumpul dan pers.

Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sejak tahun 1955. Pemilu diagendakan berlangsung setiap 5 tahun sekali namun setelah Pemilu 1955, Pemilu berikutnya adalah tahun 1971. Pada Pemilu-pemilu yang diselenggarakan pada masa Pemerintah Soeharto, banyak masyarakat menganggap bahwa Pemilu dijalankan dengan tidak adil, karena adanya intervensi-intervensi dari Pemerintah pada saat itu. Pada pemilu masa Pemerintahan Soeharto terdapat 3 partai besar yang bersaing yaitu Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada setiap Pemilu yang diselenggarakan hasil yang didapat selalu saja sama yaitu berakhir dengan kemenangan GOLKAR.

Pada masa pemerintahan Soeharto sampai dengan Gus Dur yang kemudian digantikan oleh Megawati, Pemilu dilaksanakan untuk memilih partai pemenang namun posisi Presiden diangkat atau diberi mandat oleh MPR. Dengan kemenangan GOLKAR yang terus menerus pada Pemilu yang diselenggarakan, maka secara otomatis Soeharto juga berulang kali diberi mandat oleh MPR untuk menduduki kursi pemerintahan. Sehingga pemerintahan yang dijalankan oleh Soeharto dapat bertahan sampai dengan 32 tahun. MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada masa pemerintahan Soeharto tidak dapat menunjukkan kekuatannya sebagai sebuah lembaga di atas Presiden. Nyatanya MPR tetap berada di bawah kendali Soeharto, dengan kemenangan GOLKAR dan mayoritas anggota MPR berasal dari partai Golkar maka pergantian kepemimpinan dianggap sebuah hal yang mustahil terjadi. Soeharto kemudian pada tahun 1998 mengundurkan diri

akibat demonstrasi yang meluas di Indonesia menuntut pengunduran dirinya serta pernyataan Harmoko sebagai ketua MPR pada saat itu yang meminta Soeharto untuk mengundurkan diri.

Setelah mundurnya Soeharto, Pemilu kemudian dilaksanakan pada tahun 1998 (pada masa pemerintahan BJ Habibie) dimana PDI yang kemudian berganti nama menjadi PDI Perjuangan memenangkan Pemilu ini dan menunjuk Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden Republik Indonesia dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Berselang 3 tahun setelah kepemimpinannya, MPR mencabut mandat Gus Dur sebagai Presiden dan kemudian menempatkan Megawati sebagai Presiden RI. Megawati menjabat sebagai Presiden sampai dengan tahun 2004 dan kemudian digantikan oleh SBY pada pemilu 2004 sebagaimana dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan umum mengenai Pemilu-pemilu yang pernah diselenggarakan di Indonesia, maka dapat dipahami bahwa kondisi perpolitikan Indonesia antara periode krisis finansial 1997-1998 dengan kondisi perpolitikan Indonesia pada periode krisis global 2008 sangatlah berbeda.

Pada periode krisis finansial Asia 1997-1998, Indonesia masih terbelenggu oleh kekuasaan Soeharto. Kondisi politik ini kemudian menemui puncaknya dimana masyarakat tidak lagi merasa nyaman dengan kepemimpinan Soeharto dan menuntutnya untuk mundur. Gejolak-gejolak politik ini kemudian berubah menjadi *chaos* ketika Soeharto tidak kunjung turun dari kekuasaannya. Masyarakat yang merasa “terjajah” pada saat itu kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti penjarahan dan penyerangan terhadap etnis Cina. Konflik-konflik yang terjadi ini secara langsung berdampak pada perekonomian karena lumpuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi pada saat terjadinya gejolak politik ini. Pada saat Indonesia sedang dilanda krisis yang sangat dahsyat ditambah lagi dengan munculnya gejolak politik yang juga sangat dahsyat maka menjadikan Indonesia sebagai negara dengan dampak krisis terbesar.

Berbeda halnya dengan gejolak politik yang dirasakan pada tahun 2008 yaitu pada periode krisis global. Puncak krisis global bertepatan dengan

Universitas Indonesia

momentum pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, program-program terkait pemilu menjadi semacam “katup pengaman”. Sebagaimana terjadi di hampir semua negara di dunia, pemilu selalu identik dengan pelanggaran likuiditas dalam masyarakat.¹⁸

Menyadari betapa buruknya dampak terhadap pengangguran di sektor riil, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya menjadi “bantalan” (*buffer*) guna meredam gejolak ekonomi agar tidak merembet ke ranah politik dan sosial. Masih ditambah dengan faktor pemilu, berbagai program yang sifatnya transfer langsung kepada masyarakat semakin intens, seperti pemberian beras langsung kepada golongan miskin (*raskin*), bantuan langsung tunai (BLT), dan sebagainya. Kebijakan ini hanyalah meredam risiko jangka pendek, sementara risiko jangka panjangnya masih belum tersentuh.¹⁹

Dampak dari kebijakan ini pada pemilihan langsung Presiden adalah menetapkan SBY sebagai Presiden pilihan rakyat yang mengemban kepercayaan penuh dari masyarakat. Hal ini kemudian membawa keuntungan tersendiri bagi Presiden SBY dalam menentukan langkah-langkah yang diambil dalam merumuskan kebijakan. Sebagaimana yang terjadi pada penanganan krisis global 2008. Indonesia tidak merasakan dampak yang besar karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan SBY dianggap mampu menangkal masuknya dampak krisis ke Indonesia. Hal ini serta merta membawa dampak positif bagi dunia luar sehingga para investor asing tidak menarik dana investasinya seperti yang dilakukan pada saat krisis finansial Asia 1997-1998 dimana penarikan besar-besaran dana investasi asing dari Indonesia oleh para investor asing semakin menambah keterpurukan ekonomi Indonesia.

Selain itu, dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan pers, sebagaimana diketahui bahwa selama masa Pemerintahan Soeharto, kebebasan ini praktis tidak dapat berjalan. Pemerintahan Soeharto mengisyaratkan

¹⁸ A. Prasentyanoko.. (2010). *Ponzi Ekonomi: Prospek Indonesia di Tengah Instabilitas Global*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, p. 129

¹⁹ Ibid

rambu-rambu yang sangat jelas dan kuat dalam penanganan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan pers. Berita maupun informasi-informasi yang ditayangkan tidak boleh bersifat mengkritisi Pemerintahan Soeharto. Konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan salah satunya adalah dengan menutup kantor redaksi sebuah majalah seperti yang terjadi pada kasus Majalah TEMPO.

Sedangkan dalam periode krisis global 2008 yaitu pada masa Pemerintahan Presiden SBY, kebebasan berekspresi, berkumpul, dan pers sudah mulai lebih terbuka dalam artian bahwa Pers dan masyarakat dapat mengkritisi Pemerintahan yang sedang berkuasa. Meskipun dari segi voice and accountability Pemerintahan SBY lebih baik dari masa Pemerintahan Soeharto, namun tidak sepenuhnya dapat berjalan lancar. Pemerintahan SBY juga melakukan pencekalan terhadap beberapa judul buku yaitu: Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (karya ilmiah John Roosa), Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat (karya Socrates Sofyan Yoman), Lekra Tak Membakar Buku. Suara Senyap-Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan), Enam Jalan Menuju Tuhan (karya Darmawan), dan Mengungkap Misteri Keragaman Beragama (karya Syahrudin Ahmad).²⁰

Satu buku yang tidak dilarang secara resmi, tetapi toko-toko buku diintimidasi agar tidak menjualnya adalah karya George Junus Aditjondro, Membongkar Gurita Cikeas. Di Balik Skandal Bank Century, penerbit GalangPress, Yogyakarta, 2009. Buku ini menguak bisnis keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari bisnis energi sampai ke kue kering, serta kaitannya dengan skandal Bank Century. Buku ini tidak dapat diterbitkan atau bahkan ditarik peredarannya karena dianggap menyebarkan berita fitnah atas Pemerintahan SBY.²¹

²⁰ *Rezim Bredel Buku Berlanjut*. (2010, Januari 9). Dipetik Desember 12, 2010, dari <http://edukasi.kompas.com/>:
<http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/09/03144041/.Rezim.Bredel.Buku.Berlanjut>

²¹ Ibid

Pelarangan-pelarangan yang dilakukan pada kedua pemerintahan ini justru berdampak negatif pada pencitraan kedua presiden. Bahkan secara terbuka beberapa kelompok menganggap bahwa Pemerintahan SBY merupakan penerapan kembali sistem Orde Baru atau dengan kata lain tidak berbeda dengan pemerintahan Soeharto.

Pembelengguan pers pada dasarnya sangat berdampak pada disinformasi yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana yang terjadi pada masa Pemerintahan Soeharto, akibat terbatasnya akses informasi serta terbatasnya ijin pemberitaan maka banyak kejadian-kejadian, tindakan-tindakan bahkan kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Soeharto yang tidak populer di masyarakat. Pada periode ini, informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait permasalahan ekonomi, politik maupun sosial lebih banyak mengikuti informasi yang didapat dari para pejabat Pemerintahan yang notabene merupakan perpanjangan Soeharto sehingga kondisi riil sektor-sektor tersebut tidak secara transparan terkomunikasikan ke khalayak umum. Hal ini memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat akibat kurangnya informasi sehingga dampak krisis menjadi sangat dahsyat. Berbeda halnya dengan pemerintahan SBY, pemberitaan di media lebih terbuka sehingga informasi-informasi yang diterima masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, politik serta sosial di Indonesia dan di ranah internasional semakin terbuka. Dengan wawasan yang lebih luas maka masyarakat akan menjadi lebih siap dengan kemungkinan datangnya krisis global sebagaimana yang terjadi pada krisis global 2008. Informasi awal yang diterima masyarakat mengenai berlangsungnya krisis di AS mengakibatkan masyarakat menjadi lebih siap dalam menghadapi dampak krisis melalui tindakan antisipasi seperti menyelamatkan aset-aset mereka di sektor perbankan dan finansial.

4.3.2 *Political stability*

Indikator ini menjelaskan mengenai kemungkinan suatu pemerintahan terancam instabilitas akibat berbagai ancaman atau tindakan inkonstitusional, termasuk terorisme.

Masyarakat Indonesia pada saat masa terjadinya krisis finansial Asia 1997-1998 sedang berada pada titik jenuh atas Pemerintahan Soeharto, sehingga pada saat itu sebagaimana di jelaskan dalam poin 4.1 bahwa masyarakat menuntut Soeharto untuk segera mundur dari jabatannya. Dengan dukungan militer yang kuat pada masa pemerintahan Soeharto, tidak ada elemen masyarakat yang berani secara frontal mengkritik atau bahkan mengemukakan pendapat mengenai Pemerintahan Soeharto karena takut akan adanya ancaman-ancaman. Namun seiring dengan berjalannya waktu, “kepatuhan” masyarakat akhirnya berbalik dengan pemberontakan yang terjadi melalui aksi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di seluruh Indonesia. Munculnya aksi demonstrasi besar-besaran ini serta penanganan demonstrasi secara militer oleh Soeharto yang kemudian menimbulkan kondisi instabilitas politik di Indonesia. Soeharto menggunakan “cara lama” dalam menundukkan gejolak-gejolak politik di masyarakat. Nyatanya penanganan ini tidak berhasil hingga Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden.

Berbeda halnya dengan yang dialami oleh SBY. Pada masa pemerintahan SBY, hampir tidak ada gejolak-gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Kondisi politik relatif stabil meskipun terdapat ancaman terorisme dengan munculnya peristiwa-peristiwa pemboman yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai ‘mujahiddin’, namun peristiwa ini tidak menimbulkan efek yang berarti dalam stabilitas politik Indonesia. Penanganan teroris melalui Densus 88 yang telah beberapa kali mengamankan teroris di Indonesia memberikan dampak positif karena masyarakat dunia mempercayai bahwa Indonesia mampu menyelesaikan masalah terorisme di dalam negerinya. Hal ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian di Indonesia. *Travel warning* yang sempat dikeluarkan oleh beberapa negara untuk perjalanan dengan tujuan Indonesia kemudian dihapuskan sehingga sektor-sektor riil serta indikator makro ekonomi Indonesia tidak mengalami guncangan yang berarti. Stabilitas politik Indonesia pada tahun 2008 khususnya pada saat krisis global menyebabkan dampak krisis global 2008 relatif kecil bagi Indonesia.

Berdasarkan pada penjelasan mengenai stabilitas politik pada kedua periode di atas, maka dapat diketahui bahwa kondisi politik yang stabil cenderung memberikan efek positif dalam besaran dampak suatu krisis finansial. Kerentanan politik yang terjadi pada tahun 1998 kemudian semakin menenggelamkan Indonesia ke dalam pusaran krisis, lain halnya dengan kondisi pada tahun 2008 dimana gejolak politik yang relatif sedikit sehingga Indonesia tidak merasakan dampak krisis finansial global secara langsung.

4.3.3 *Government effectiveness*

Indikator ini menjelaskan mengenai kualitas pelayanan masyarakat, kapasitas pelayanan sipil dan kemerdekaan dari tekanan militer; kualitas dari formulasi kebijakan.

Pada tahun 1996 Indonesia menunjukkan tingkat *government effectiveness* yang cukup tinggi. Kualitas dari formulasi kebijakan pada pemerintahan Soeharto dianggap efektif dalam mengatur kehidupan bernegara termasuk dalam aspek-aspek ekonomi serta politik. Selama pemerintahan Soeharto, kebijakan seperti penetapan sistem kurs nyatanya berhasil menjadikan nilai tukar rupiah berdiri stabil pada kisaran Rp. 2.300 – Rp. 2.500 /US\$. Kebijakan politik yang dihasilkan pada masa ini juga dianggap efektif karena Indonesia hampir tidak pernah mengalami guncangan-guncangan politik.

Kebijakan yang dihasilkan selama pemerintahan Soeharto mendapat dukungan penuh dari tingkat legislatif yaitu MPR sehingga tidak terdapat gejolak yang berarti dalam penerapan kebijakan-kebijakan ini. Selain dukungan penuh dari legislatif, Soeharto juga mendapat dukungan dari aspek militer. Dukungan militer ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akan membawa dampak pada implementasi kebijakan di tingkat masyarakat.

Namun pada saat terjadinya krisis sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2, akibat jenuhnya masyarakat serta budaya “KKN” yang semakin merajalela di Indonesia menyebabkan masyarakat menuntut mundur Soeharto dari jabatannya

serta perubahan dalam kebijakan ekonomi dengan mengganti sistem kurs yang dilakukan oleh Soeharto kemudian justru semakin memperparah kondisi perekonomian Indonesia yang serta merta semakin mengancam posisinya di kursi kepresidenan.

Sedangkan semenjak tahun 2004-2008 tingkat *government effectiveness* terlihat stabil. Hal ini berkaitan erat dengan pemilu yang dilakukan melalui cara pemilihan langsung Presiden sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Presiden terpilih sangatlah besar. Dengan kepercayaan ini, maka Presiden SBY dapat dengan leluasa menetapkan langkah-langkah kebijakannya serta cara penanganan permasalahan dalam negara termasuk permasalahan politik serta ekonomi.

Pada pemerintahan SBY diketahui bahwa kualitas pelayanan masyarakat sedikit baik dengan mulai dirintisnya kebijakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini dicanangkan sebagai dampak dari kejenuhan masyarakat terhadap sistem birokrasi yang berbelit-belit selama ini. Namun semenjak adanya reformasi birokrasi kondisi ini secara perlahan dapat teratasi. Pada masa pemerintahan SBY, Presiden tidak lagi mengandalkan kekuatan militer untuk mendukung kekuasaan Presiden dalam rangka melanggengkan kekuasaan sebagaimana yang dilakukan pada Pemerintahan Soeharto. Pada masa ini, masyarakat dapat hidup dengan lebih “tenang” karena tekanan-tekanan militer yang selama pemerintahan Soeharto selalu “membayangi” sekarang tidak lagi dirasakan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penanganan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, indikator *government effectiveness* memiliki relevansi pada tingkat kepercayaan masyarakat atas kebijakan maupun tindakan yang diambil oleh Presiden. Parahnya dampak krisis yang melanda Indonesia serta kejenuhan masyarakat terhadap Soeharto kemudian melunturkan kepercayaan masyarakat atas kemampuan Soeharto dalam menangani krisis finansial 1997-1998 sehingga kerusuhan guna meminta Soeharto untuk mengundurkan diri terjadi di Indonesia. Sedangkan pada Pemerintahan SBY sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada saat terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap SBY masih cukup tinggi sehingga penanganan krisis menjadi lebih terfokus.

4.3.4 *Regulatory Quality*

Indikator ini menjelaskan mengenai kemampuan pemerintah untuk menyediakan kebijakan dan regulasi yang dapat memfasilitasi dan mempromosikan pembangunan sektor swasta.

Kualitas kebijakan yang dihasilkan pada masa Pemerintahan Soeharto sebelum terjadinya krisis yaitu pada tahun 1996 dianggap sesuai dengan perkembangan berbagai sektor di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomian yang sangat mencengangkan sampai dengan tahun 1996. Selain dilihat dari aspek perekonomian, situasi politik serta sosial di Indonesia sampai dengan tahun 1996 relatif tidak bergejolak. Namun pada tahun 1998, kualitas kebijakan menunjukkan trend menurun.

Penurunan kualitas kebijakan pada tahun 1998 atau pada masa krisis diyakini akibat dari kesalahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Soeharto pada saat itu. Dalam kondisi kacaunya pasar mata uang, Soeharto melepaskan kebijakan sistem kurs tetap Rupiah dan menggantinya dengan kurs mengambang. Diambangkannya mata uang Rupiah semakin memberi peluang bagi para spekulan untuk melakukan aksi *short selling*. Hal ini kemudian berdampak pada terdepresiasinya mata uang Rupiah hampir 300% dari nilai pada saat menggunakan sistem kurs tetap. Depresiasi rupiah sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2 kemudian berdampak pada membengkaknya hutang luar negeri yang harus dibayarkan oleh Indonesia. Pengambilan kebijakan yang tidak tepat ini serta merta menjadikan masyarakat kehilangan kepercayaan pada Soeharto atas kemampuannya menangani krisis finansial Asia 1997-1998. Pada akhirnya masyarakat menilai bahwa Soeharto tidak mampu untuk menyelesaikan krisis ini dan menuntut pergantian kepemimpinan.

Depresiasi rupiah secara langsung berdampak pada sektor swasta dimana banyak perusahaan besar yang terpaksa mendeklarasikan kebangkrutan mereka karena ketidakmampuan membayar biaya produksi serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan hutang-hutang usaha mereka. Situasi perekonomian yang tidak kondusif menjadikan Indonesia memasuki era deindustrialisasi. Krisis finansial

Universitas Indonesia

Asia 1997-1998 menyebabkan Indonesia terjebak pada perilaku konsumsi. Akibat ketidakmampuan untuk memproduksi maka Indonesia semakin terpuruk dalam sektor perekonomiannya. Indonesia semenjak krisis finansial Asia 1997-1998 berkembang menjadi distributor dan konsumen. Produk-produk mentah tidak lagi diproduksi di Indonesia melainkan diproduksi di luar negeri untuk kemudian dikirimkan kembali ke Indonesia untuk didistribusikan dan dijual.

Kondisi ini sungguh memprihatinkan karena di kala Indonesia harus membangun kembali perekonomiannya, pada saat yang bersamaan aset-aset negara seperti BUMN mulai dijual ke pihak-pihak asing. Aset-aset yang dijual seperti Astra, Telkom, dan lain sebagainya. Aset-aset yang diharapkan dapat menjadi pemasok terbesar bagi perekonomian Indonesia justru menjadi *boomerang* karena setelah saham mayoritas dimiliki pihak asing maka kebijakan perusahaan harus mengikuti kepentingan pihak asing tersebut. Dengan kebijakan perusahaan yang terkait dengan kepentingan asing tersebut, maka banyak dari para pemilik perusahaan ini yang melokalisasi basis produksi mereka ke negara lain dan menghapuskan produksi di Indonesia.

Sedangkan pada masa pemerintahan SBY, kualitas kebijakan menunjukkan peningkatan. Dengan kondisi perekonomian yang masih mulai menata diri, krisis global 2008 kembali menerpa dunia dan berdampak pada Indonesia. Skema penanganan krisis oleh pemerintahan SBY fokus pada kebijakan sektor perbankan. Hal ini dianggap sangat sesuai karena sasaran dari krisis global 2008 adalah sektor perbankan, pasar saham dan keuangan. Adapun 10 perintah SBY dalam penanganan krisis global yaitu:

1. Terus memupuk rasa **optimisme dan saling bekerjasama** sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus **mencari peluang ekspor dan investasi** serta mengembangkan perekonomian domestik.
3. **Optimalkan APBN 2009** untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan *social safety net* dengan sejumlah hal yang harus

diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM.

4. Kalangan dunia usaha diminta tetap mendorong **sektor riil agar dapat bergerak**.
5. Semua pihak agar lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.
6. Galakkan kembali **penggunaan produk dalam negeri** sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.
7. Perkuatan **kerjasama lintas sektor** antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta.
8. Menghindari sikap ego sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi.
9. Berkait dengan tahun politik pada 2009, semua pihak diminta memiliki pandangan politik nonpartisan serta **mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan** maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.
10. Semua pihak diminta melakukan **komunikasi yang tepat dan baik** pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha serta perbankan.²²

Kesepuluh perintah SBY ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat umum, sektor keuangan, BUMN sampai dengan politisi. Sepuluh perintah ini dianggap dapat membantu Indonesia dalam menangani dampak krisis global 2008 yang melanda dunia saat ini.

Sektor swasta mulai banyak bermunculan pada masa pemerintahan SBY. Semakin banyak pengusaha yang muncul dalam periode ini. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sektor swasta di Indonesia mulai menjanjikan. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sebagai pendukung berkembangnya sektor swasta pada

²² Tonton Taufik (2008, Oktober 14). *10 Perintah Presiden RI menghadapi Krisis Global*. Dipetik Desember 12, 2010, dari <http://www.export-import-indonesia.com/>: <http://www.export-import-indonesia.com/blog/perintah-presiden-menghadapi-krisis-global.html>

masa Pemerintahan SBY dianggap mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi perkembangan bisnis mereka. Dapat dilihat bahwa saat ini para wirausahawan muda mulai banyak bermunculan. Mereka melakukan inovasi terhadap bisnis mereka dan dapat berkembang secara baik pada periode pemerintahan SBY ini. Salah satu kebijakan yang digulirkan oleh SBY dalam mendukung berkembangnya sektor swasta adalah melalui pengucuran kredit usaha rakyat (KUR) serta berbagai model pembiayaan lainnya seperti kredit wirausaha mandiri.

Langkah pengucuran kredit untuk modal usaha untuk masyarakat ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat baik bagi sektor swasta. Dengan menggeliatnya sektor swasta maka secara tidak langsung dapat meningkatkan PDB Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan mengenai perbedaan kualitas kebijakan penanganan krisis pada masa pemerintahan Soeharto dan pemerintahan SBY, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas kebijakan pada kedua Pemerintahan ini menunjukkan trend yang berbeda. Pada pemerintahan Soeharto kecenderungan kualitas kebijakan pada masa krisis menurun akibat kesalahan penanganan krisis maka hal berbeda ditunjukkan oleh Pemerintahan SBY dimana kualitas kebijakan menunjukkan kecenderungan yang lebih meningkat karena penanganan krisis global 2008 yang tepat sasaran.

Selain dari kebijakan yang dihasilkan, kualitas kebijakan kedua pemerintahan berbeda karena pada pemerintahan Soeharto kondisi politik sangat bergejolak yang kemudian berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada Soeharto. Sedangkan pada masa pemerintahan SBY, situasi politik menjelang pemilu pada saat itu cenderung menguatkan posisi SBY karena kebijakan-kebijakan perekonomian yang sifatnya langsung dan tepat sasaran.

4.3.5 *Rule of law*

Indikator ini menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Tingkat kepatuhan terhadap hukum pada masa Pemerintahan Soeharto (sampai dengan tahun 1996) dianggap relatif tinggi karena pada masa pemerintahannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Soeharto didukung oleh kekuatan Militer dimana sokongan kekuatan militer ini dapat memberikan efek represif kepada masyarakat untuk dapat mematuhi hukum serta undang-undang yang berlaku di Indonesia pada saat itu. Tingginya tekanan terhadap masyarakat kemudian menimbulkan rasa takut yang mengakibatkan masyarakat menjadi sangat patuh terhadap kepemimpinan Soeharto.

Pada saat krisis, sebagaimana dijelaskan pada Bab 2 dalam keadaan yang sangat *chaos*, indikator ini secara otomatis menunjukkan penurunan. Hal ini diakibatkan oleh munculnya keresahan serta kejenuhan masyarakat atas sifat “patuh” yang selama ini telah membudaya. Kondisi patuh ini kemudian seakan berbalik menjadi penentangan atas pemerintah Soeharto. Soeharto pada saat terjadinya demonstrasi besar-besaran tidak berada di Indonesia karena sedang menghadiri KTT di Kairo. Soeharto dalam konferensi persnya menyatakan bahwa Ia percaya bahwa kerusuhan yang terjadi dapat diatasi. Kepercayaan diri Soeharto ini diasumsikan ketika Soeharto mendapat dukungan penuh dari aspek militer sehingga Soeharto percaya bahwa dengan tindakan represif maka kekacauan yang terjadi dapat teratasi. Namun perkiraan serta kepercayaan Soeharto ini ternyata salah, kali ini masyarakat tidak lagi “patuh” terhadap peraturan yang ada dan cenderung berlaku anarkis. Masyarakat tidak lagi memperdulikan tindakan represif yang akan serta dapat dilakukan oleh ABRI.

Kekacauan yang terjadi pada masa krisis berlanjut hingga ke praktek penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam menyikapi kekacauan ini ABRI tidak dapat berbuat banyak. Meskipun terdapat korban jiwa dan banyak korban luka-luka dalam kekacauan yang terjadi pada masa krisis finansial Asia, namun masyarakat serta mahasiswa pantang mundur dalam menyuarakan aspirasi mereka. Pengunduran diri Soeharto merupakan harga mati bagi perjuangan masyarakat dan mahasiswa kala itu.

Pada tahun 2008 dampak krisis finansial memang hampir tidak terasa di Indonesia, namun seperti dijelaskan dalam poin 4.2 bahwa melalui terkuaknya kasus Century, masyarakat semakin sadar bahwa peraturan yang sudah ada cenderung untuk dilanggar oleh pembuat peraturan itu sendiri. Dalam kasus Century, undang-undang yang digunakan berubah guna menyesuaikan kondisi Century pada saat itu sehingga *rule of law* pada pemerintahan SBY juga dianggap masih lemah. Selain itu, pada tahun 2010 semakin jelas bahwa *rule of law* lemah ketika banyak kasus korupsi yang melanda Indonesia namun para koruptor tidak juga jera melakukan tindakan korupsi karena faktor hukuman yang cenderung ringan.

4.3.6 *Control of corruption*

Indikator ini menjelaskan mengenai tingkatan dimana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk bentuk-bentuk kecil dan besar dari korupsi, serta “dominasi” elite terhadap negara.

Kontrol terhadap korupsi perlu mendapat penekanan yang lebih daripada indikator lainnya karena kontrol terhadap korupsi yang ada di Indonesia baik pada periode pemerintahan Soeharto maupun pada periode Pemerintahan SBY dianggap masih lemah.

Tingkat kontrol terhadap korupsi pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2008 tidaklah jauh berbeda. Potret kontrol terhadap korupsi ini masih sangat memprihatinkan. Masa pemerintahan berkepanjangan dari Soeharto yaitu 32 tahun seakan mengajarkan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kebudayaan KKN ini. Praktek KKN pada masa pemerintahan soeharto tumbuh secara subur. Meskipun tidak pernah terkuak secara jelas namun sudah menjadi rahasia umum bahwa praktek KKN ini marak terjadi. Hampir semua elemen baik dari keluarga serta kroni-kroni Soeharto sampai dengan masyarakat awam sedikit banyak terlibat dalam tindakan KKN.

Praktek KKN banyak terjadi pada sektor-sektor tenaga kerja seperti pemberdayaan sumber daya manusia yang berasal dari keluarga maupun dari orang-orang terdekat. Pada masa pemerintahan Soeharto untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada departemen sangatlah sulit. Tes yang diadakan merupakan sebuah formalitas implementasi sistem penyaringan pegawai namun pada dasarnya setiap departemen telah memiliki bakal calon pegawai. Pada periode kepemimpinan SBY, proses penyaringan CPNS yang dilakukan melalui beberapa tes sudah menunjukkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan SBY, CPNS yang tersaring merupakan SDM-SDM yang berkualitas karena mereka melalui tes penyaringan secara murni. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada beberapa kasus, praktek kolusi penerimaan CPNS ini masih saja terjadi.

Selain pada aspek ketenagakerjaan, sektor bisnis juga menjadi sasaran empuk berkembangnya praktek KKN. Apabila sebuah perusahaan memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Cendana pada masa pemerintahan Soeharto maka bisnis mereka akan bertumbuh secara pesat. Hal ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri tanpa pengaruh dari keluarga Cendana, kecenderungan perusahaan ini akan bergerak stagnan. Apabila terjadi perkembangan dalam bisnis mereka maka tidak akan signifikan.

Pada pemerintahan SBY aspek wiraswasta semakin berkembang. Banyak wirausahawan yang mulai bermunculan. Dalam kaitannya dengan kontrol terhadap korupsi, sektor ini juga masih belum bersih dari tindakan KKN. Banyak kasus KKN yang mulai terkuak pada masa pemerintahan SBY terkait kasus korupsi pada beberapa proyek. Kasus korupsi seperti ini banyak yang berkaitan dengan para pengusaha. Para pengusaha umumnya mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan atau melancarkan jalannya suatu proyek. Sebagai contoh adalah kasus Adaro. Selain itu beberapa politisi di DPR terbukti turut andil dalam upaya pemulusan persetujuan pembukaan lahan lindung di Kalimantan guna menambah pasokan kayu sebagai bahan dasar pembuatan kertas.

Tindakan KKN juga terjadi pada aspek politik. Pada pemerintahan Soeharto sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2 bahwa untuk melanggengkan kekuasaannya di peta perpolitikan Indonesia, Soeharto menempatkan orang-orang terdekat untuk menduduki kursi kepemimpinan atau menjadi anggota dari sebuah partai politik. Hal ini terlihat dari bagaimana Soeharto menempatkan Harmoko sebagai Ketua MPR dimana pada masa pemerintahan Soeharto, Presiden dipilih dan diberi mandat oleh MPR, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa dengan posisi sebagai Ketua MPR Harmoko akan memilih dan memberi mandat kepada Soeharto untuk mensusuki kursi Kepresidenan. Selain itu, Soeharto juga melibatkan anak-anaknya di dalam kancah perpolitikan dimana Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo menjadi pengurus harian partai GOLKAR. Penempatan orang-orang untuk dijadikan anggota partai tidak hanya terjadi pada partai GOLKAR yang merupakan partai pemenang pada periode itu, namun juga terjadi pada partai lain seperti pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dimana Soeharto “menempatkan” Soerjadi untuk menjadi ketua umum PDI yang berakhir pada kericuhan pada tanggal 27 Juli 1997. Pada masa pemerintahan Soeharto, akan sangat sulit bagi orang-orang di luar *ring* Soeharto untuk dapat masuk dan berkembang dalam dunia politik.

Sedangkan pada Pemerintahan SBY, sistem yang digunakan adalah sistem multipartai sehingga orang awam pun pada periode ini mulai aktif dalam kegiatan politik. Politik pada periode SBY tidak hanya diwarnai oleh “wajah-wajah lama” saja namun juga diisi oleh politisi-politisi muda dan baru. Berbagai kalangan dapat menjadi politisi pada masa pemerintahan SBY. Dengan pembaharuan dalam bidang politik ini tidak serta merta dapat menghilangkan tindak KKN dari kancah perpolitikan di Indonesia. Setelah beberapa politisi ini terpilih untuk menjadi anggota legislatif, beberapa di antara mereka tetap menerima suap terutama terkait pengesahan undang-undang serta pemilihan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan seperti contohnya pemilihan Deputy BI. Dalam kasus pemilihan deputy BI, untuk dapat terpilih kembali menjadi Deputy BI, disinyalir Miranda Goeltom menyerahkan sejumlah uang melalui *travel cheque* kepada para anggota partai PDI Perjuangan di DPR. Hal ini diawali dari pengakuan Agus Tjondro yang

telah menerima *travel cheque* senilai Rp. 500 juta guna memuluskan langkah Miranda Goeltom untuk menjadi deputy BI. Jumlah yang diberikan kepada para anggota partai tidak seragam namun bervariasi dan porsi terbesar diberikan kepada Ketua panitia pemilihan yang Ketua fraksi PDI Perjuangan. Kasus ini masih terus bergulir karena tidak adanya pengakuan dari anggota fraksi PDI Perjuangan lainnya atas penerimaan uang suap ini. Seperti diketahui bahwa posisi Deputy BI merupakan posisi yang sangat strategis karena melalui posisi ini kebijakan-kebijakan perbankan dihasilkan. Sebagai Bank Sentral, BI memiliki *privilege* untuk mengatur seluruh pergerakan perekonomian Indonesia dari sektor perbankan.

Dalam upaya memerangi maraknya tindak KKN, Pemerintahan SBY menunjukkan keseriusannya dengan mengeluarkan kebijakan reformasi birokrasi. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berusaha untuk “merombak” sistem birokrasi yang telah ada selama ini di Departemen atau Kementerian di Indonesia dimana birokrasi yang ada selama ini dianggap sangat menyulitkan masyarakat dan tidak efektif. Meskipun kebijakan ini sangat diperlukan, namun pada prakteknya, penerapan reformasi birokrasi ini masih sangat sulit dilakukan secara penuh karena “warisan budaya” yang sudah tertanam dan mendarah dagingnya kebudayaan KKN selama masa pemerintahan Soeharto yang telah berlangsung selama 32 tahun. Pada kurun waktu periode kedua Pemerintahan SBY, dalam upaya memerangi praktek KKN, banyak kasus-kasus korupsi yang mulai terkuak dan beberapa diantaranya mengarah pada berbagai skandal-skandal politik di Indonesia.

Membudayanya tindakan KKN menjadikan Indonesia rentan terkena dampak krisis karena banyaknya jumlah uang yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Akibat besarnya jumlah penyelewangan dana ini maka dana riil yang terserap untuk sebuah program kegiatan atau proyek akan menjadi kecil. Hal ini tentu saja pada akhirnya akan merugikan rakyat. Sebagaimana kita tahu bahwa program-program yang dicanangkan Pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat atau secara lebih luas untuk memenuhi *Millenium Development Goals (MDGs)*. Apabila dana riil yang terserap menjadi

Universitas Indonesia

kecil akan berdampak langsung pada output program tersebut yang menjadi tidak optimal. Tindakan KKN merupakan sebuah tugas yang sangat berat untuk diselesaikan dalam era reformasi ini.

Terkait dengan penanganan krisis, skandal kasus Century kemudian mengarah pada tindakan Korupsi yang dilakukan oleh Robert Tantular. Setelah pengucuran dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk penanganan kasus Century, Robert Tantular melakukan penarikan namun tidak dibayarkan kepada nasabah. Pada tanggal 10 September 2009, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin Sugeng Riyono memutus Robert Tantular dengan vonis hukuman 4 tahun dengan denda Rp 50 miliar karena dianggap telah memengaruhi pejabat bank untuk tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Meskipun banyak kasus korupsi yang terkuak pada periode pemerintahan SBY, namun hukuman atas kasus pidana korupsi masih dianggap terlalu ringan. Potret pengendalian korupsi di Indonesia nyatanya masih carut marut ditambah lagi dengan kenyataan bahwa aparat penegak hukum sendiri ternyata ikut bermain dalam kasus-kasus besar korupsi dengan menerima suap untuk meringankan hukuman atau untuk membiarkan terpidana kasus-kasus korupsi ini dengan leluasa meninggalkan rumah tahanan. Pada tahun 2010, kasus inspeksi mendadak (sidak) oleh tim satgas mafia hukum yang secara mengejutkan menemukan fakta bahwa tahanan kasus korupsi seperti Artalita dapat dengan leluasa keluar masuk rumah tahanan, serta bagaimana mereka mendapatkan *privilege* melalui fasilitas kamar tahanan yang bisa disulap menjadi sebuah kamar yang sangat nyaman. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa ruangan yang disediakan adalah ruangan petugas rumah tahanan atau berada dalam lingkungan kantor.

Penegakan hukum di Indonesia melalui Undang-undangnya belum mampu menjerat terpidana kasus korupsi dengan pidana hukuman yang berat. Ringannya hukuman bagi para koruptor serta keistimewaan yang didapatkan oleh para narapidana kasus korupsi tidak akan mampu memberikan efek jera pada para koruptor ini. Implementasi reformasi birokrasi yang sesungguhnya tampaknya

menjadi salah satu aspek yang sangat penting demi berlangsungnya sebuah Pemerintahan yang bebas dari KKN.

